

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa D-IV Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember sebelum melakukan wisuda karena kegiatan PKL merupakan persyaratan kelulusan yang harus diikuti oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Melalui praktik kerja lapangan ini, mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi sebuah perusahaan atau instansi. Selain itu, diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi penghubung antara dunia kerja dengan dunia pendidikan.

Praktek Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan selama I semester penuh dan deprogram khusus pada mahasiswa semester VII bagi program studi yang menyelenggarakan program D-VI dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan atau setara dengan 900 jam. PKL ini berjumlah 20 SKS dengan total 900 jam dan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari.

Dalam kegiatan PKL ini para mahasiswa dipersiapkan untuk mengerjakan dan menyelesaikan serangkaian tugas menghubungkan pengetahuan akademiknya dengan keterampilan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud para mahasiswa diberi tugas khusus dalam bidang keahliannya oleh dosen pembimbing di Program Studinya masing-masing sesuai dengan buku pedoman PKL yang telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. KPPN Surabaya I merupakan KPPN Tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I adalah salah satu KPPN percontohan yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi yang

dilaksanakan oleh Departemen Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Surabaya I yang saat ini kedudukannya adalah sebagai KPPN percontohan. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 pada tanggal 06 Januari 2009, KPPN Surabaya I ditetapkan sebagai KPPN Percontohan Tahap IV oleh Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur melalui *Grand Launching* KPPN Percontohan pada tanggal 15 Januari 2009 yang dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja, Perbankan, Pemerintah Daerah, serta jajaran dari Kementerian Keuangan.

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa melalui Ditjen Perbendaharaan yaitu pada 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, salah satunya KPPN Surabaya I. Penyaluran Dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa melalui KPPN Surabaya I dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output atas penyaluran Dana Desa tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Pelaksanaan penyaluran melalui KPPN Surabaya I diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pemantauan dan Evaluasi dimaksud dilaksanakan secara berjenjang oleh KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran Dana Desa.

Manfaat Pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa adalah untuk mengetahui perkembangan penyaluran dan untuk pengambilan keputusan dalam penyaluran. Oleh karena itu mekanisme penyaluran Dana Desa melalui KPPN Surabaya I akan dibahas pada bab pembahasan laporan PKL.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini memiliki tujuan, namun secara umum tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I adalah :

1. Membandingkan teori dengan praktik.
2. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Untuk memperoleh keterampilan teknis (Akuntansi Sektor Publik) pada instansi pemerintahan.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Selain tujuan umum diadakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini juga terdapat tujuan khusus dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 1 ini adalah :

1. Dapat menjelaskan proses Pembinaan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) untuk menunjang Realisasi Anggaran pada KPPN Surabaya 1.
2. Untuk mengetahui tugas apa saja yang ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 1.
3. Dapat Mengetahui tugas pokok dan peranan dari seksi Bank KPPN Surabaya I.

1.2.3 Manfaat PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Instansi atau perusahaan, adapun manfaat tersebut, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa:
 - a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
 - b. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan agar nantinya terbiasa saat menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
2. Bagi Perguruan Tinggi:
 - a. Terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi.
 - b. Perguruan tinggi akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja praktik/magang.
3. Bagi Instansi atau Perusahaan:
 - a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
 - b. Dapat membantu pekerjaan karyawan.

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I dan ditempatkan pada Seksi Pencairan Dana (PD), Verifikasi dan Akuntansi (VERA), Seksi Bank, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), serta Seksi Umum. Penempatan dilakukan secara bergiliran setiap bulan sekali, berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan yaitu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 1, yang beralamatkan di Jl. Indrapura No.5, Krembangan Sel. Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175, Telepon (031) 3545639, Faksimile (031) 3523992, Surel kppnsurabaya1@gmail.com, Laman www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1.

Kegiatan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dengan jam yang disesuaikan dengan kegiatan yang ada di lapangan.

1.4 Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan utama PKL, maka metode pada saat pelaksanaan PKL adalah:

1. Pembekalan PKL

Kegiatan pembekalan PKL dilakukan sebelum mahasiswa memulai Praktek Kerja Lapangan (PKL). Pembekalan PKL berisi tentang materi sebagai bekal PKL. Kegiatan pembekalan PKL dilaksanakan secara online melalui Room Zoom Meeting karena masih dalam pandemic Covid 19 sehingga masih belum memungkinkan apabila pembekalan dilakukan secara offline.

2. Pelaksanaan PKL

- a. Metode yang digunakan selama proses PKL yaitu setiap bulan dilakukan rolling dari empat seksi yang terdiri dari Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Subbag Umum, dan Seksi MSKI. Selama pelaksanaan PKL mahasiswa mengikuti semua kegiatan operasional yang dilakukan di setiap bagian pada KPPN Surabaya I. Adapun metode pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :

1. 01 September 2021 sampai 30 September 2021 ditempatkan pada Subbagian Umum dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB terlaksana 187 jam.
2. 01 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021 ditempatkan pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB terlaksana 170 jam.
3. 01 November 2021 sampai 30 November 2021 ditempatkan pada Seksi Pencairan Dana (PD) dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB terlaksana 187 jam.

4. 01 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021 ditempatkan pada Seksi Bank dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB terlaksana 195,5 jam.
 5. 01 Januari 2022 sampai 28 Januari 2022 ditempatkan kembali pada Subbagian Umum dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB terlaksana 197 jam.
- b. Mahasiswa wajib mengisi *log-book* yang diisi sesuai dengan kegiatan harian yang dilakukan dan disahkan oleh dosen pembimbing, dosen pembimbing lapang, dan ketua jurusan.
3. Pelaporan Hasil PKL
- Menyusun karya ilmiah berupa laporan kegiatan PKL sesuai dengan kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan, dan melaporkan hasil laporan kepada dosen pembimbing.